

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Inflasi bisa menyebabkan ketidakpastian mengenai harga relatif dan tingkat indeks harga di masa depan, sehingga dapat menyebabkan penurunan efisiensi ekonomi. Inflasi terjadi saat harga-harga komoditi secara umum itu naik, yang disebabkan tidak sinkronnya program dari sistem pengadaan komoditi (seperti produksi, pencetakan uang, penentuan harga) dengan tingkat pendapatan masyarakat (Iskandar Putong, 2016). Inflasi dapat membahayakan pertumbuhan ekonomi, terutama ketika inflasi tinggi. Oleh karena itu, di beberapa dekade terakhir pembuat kebijakan berbagai negara didunia semakin sadar akan biaya sosial dan ekonomi yang ditimbulkan akibat inflasi yang tinggi. Para ekonom mulai membahas biaya yang ditanggung sebagai dampak dari tingginya inflasi sejak tahun 1960, dimana dunia mengalami kenaikan inflasi yang cukup tinggi. Di Indonesia, inflasi tinggi pernah terjadi waktu Indonesia alami krismon pada tahun 1998.

Kesadaran akan tingginya inflasi yang perlu diperangi, serta biaya yang ditanggung akibat inflasi memunculkan pandangan bahwa inflasi yang rendah dan stabil lebih baik, dan akan mendorong produktivitas sumber daya ekonomi serta mendukung pertumbuhan ekonomi. Dimana stabilitas harga menjadi faktor penting bagi pertumbuhan ekonomi. Jadi, stabilitas harga yang didefinisikan sebagai inflasi yang stabil serta rendah dianggap sebagai tujuan utama dari kebijakan moneter (Smida & Aguir, 2015).

Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan utama kebijakan moneter diperlukan sebuah indikator yang digunakan sebagai strategi kebijakan. Indikator itu disebut juga *nominal anchor*, yang artinya variabel nominal seperti inflasi dan jumlah uang beredar yang dapat membatasi fluktuasi harga untuk mencapai stabilitas harga. Terdapat tiga strategi kebijakan moneter yang merupakan penentuan

nominal anchor, yaitu target moneter, target inflasi, dan *implicit nominal anchor*. Kerangka yang cukup populer untuk memerangi inflasi adalah kerangka penargetan inflasi. Dimana kerangka ini memiliki keunggulan dibandingkan dengan strategi lain karena lebih berkorelasi dengan fluktuasi harga (Mishkin, 2007).

Penargetan inflasi ditandai dengan pengumuman kisaran target resmi untuk tingkat inflasi pada satu atau lebih periode, dimana inflasi yang rendah dan stabil adalah tujuan utama dari kebijakan moneter. Kebijakan moneter dengan strategi sasaran inflasi telah banyak diadopsi oleh banyak negara. Selandia Baru adalah negara pertama yang menerapkan strategi penargetan inflasi ditahun 1990, diikuti oleh Kanada 1991, Inggris 1992, Swedia dan Finlandia pada tahun 1993, Australia dan Spanyol pada tahun 1994, diikuti oleh negara lain seperti Israel, Chile, dan Brasil (Mishkin, 2007). Indonesia menerapkan penargetan inflasi di tahun 2000.

Penargetan inflasi diharapkan dapat mengontrol laju inflasi sehingga tujuan kebijakan moneter dapat tercapai atau berhasil. Namun, kapan kebijakan moneter dikatakan berhasil? Yaitu jika mencapai target atau sasaran akhir yang diharapkan. Yang dimana sasaran akhir dari kebijakan moneter yaitu laju inflasi yang rendah dan juga stabil. Selain itu, kebijakan moneter juga memiliki target berupa pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, kesempatan kerja, kestabilan harga, dan keseimbangan neraca pembayaran (Pohan 2008).

Dalam kajian ini, fluktuasi inflasi yang cukup besar tentunya memerlukan suatu metode evaluasi untuk mengukur ketepatan metode tersebut dalam mencapai inflasi yang ditargetkan. Dan indikator keberhasilan kebijakan moneter biasanya diukur dengan menghitung efisiensi. Efisiensi kebijakan moneter nantinya akan memperlihatkan bagaimana ketepatan kebijakan dalam mencapai sasaran inflasi. Nantinya, seberapa besar penyimpangan inflasi yang terjadi dari inflasi yang ditargetkan dapat memperlihatkan tingkat efisiensi kebijakan moneter.

Selain itu, dikatakan optimal dan efisiennya kinerja dari kebijakan moneter yaitu apabila meminimalkan fungsi kerugian sosial. Maksudnya, bank sentral

akan meminimalkan fungsi kerugian yang berkaitan dengan fluktuasi inflasi dan output. Beberapa ekonom dunia tentunya telah melakukan penelitian mengenai efisiensi dari kebijakan moneter yang dilakukan dengan cara menghitung fungsi kerugian, dimana yang cukup terkenal adalah Cecchetti & Krause. Dan pengukuran tingkat efisiensi dilaksanakan dengan memakai *efficiency frontier*, dimana didalamnya terdapat *loss function* (fungsi kerugian), yang akan memperlihatkan *trade-off* yang terjadi diantara variabilitas inflasi dan juga variabilitas output, sesuai dengan anggapan bahwa bank sentral memiliki tujuan yakni meminimalkan variabilitas inflasi dan variabilitas output.

Karena inflasi memiliki hubungan *trade-off* dengan output, dimana output juga menjadi tujuan dari pembangunan ekonomi, maka dalam mengukur efisiensi kebijakan moneter, selain variasi inflasi juga diperhitungkan variasi output. Oleh karena itu, efisiensi kebijakan moneter biasanya dihitung dari variasi output dan variasi inflasi. Hal ini sesuai dengan pernyataan bahwa di dalam *social loss function* (fungsi kerugian sosial), bank sentral diasumsikan berkonsentrasi kepada kerugian berkaitan dengan fluktuasi inflasi dan output sekitar tingkat level yang diharapkan (Smida & Aguir, 2015).

Pengukuran efisiensi kebijakan moneter sebelumnya pernah diteliti oleh Eka P dan Siti H R berjudul *Measurement of the Efficiency of Monetary Policy* dengan hasil diterapkannya ITF secara penuh di Indonesia membuat tingkat efisiensi kebijakan moneter lebih tinggi. Penelitian lain oleh Meylinda Sulfiana Putri dan Dr. Wahyuningsih, berjudul Efisiensi Kebijakan Moneter di negara Indonesia (model Checeetti & Krause), dengan hasil yaitu kebijakan moneter dinyatakan lebih efisien untuk jangka panjang dibanding jangka pendek.

Penelitian tentang topik kebijakan moneter tentunya cukup sering dilakukan, tetapi lebih kepada aspek efektivitas dari instrumen kebijakannya. Sementara itu, tingkat efisiensi kebijakan moneter juga perlu dikaji. Tentunya topik ini akan menarik untuk dibahas. Dan setelah melakukan riset, penulis juga menemukan bahwa kajian mengukur tingkat efisiensi kebijakan moneter masih terbatas dilakukan, khususnya di Indonesia. Apalagi jika dilakukan di 2 periode ITF (periode transisi ITF dan periode implementasi penuh ITF di Indonesia).

Dimana dalam 2 periode ini, diharapkan kita dapat melihat adanya perbedaan tingkat efisiensi kebijakan moneter di Indonesia, dan seberapa besar perbedaannya. Oleh karena itu, apakah kebijakan moneter yang diterapkan relatif sudah efisien ataupun belum efisien sangat penting untuk diketahui dan diteliti, dengan mencermati besaran kerugian atau penyimpangan kebijakan moneter itu sendiri.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang dianalisis dan dikaji di penelitian ini yaitu bagaimana tingkat efisiensi dari penerapan kebijakan moneter masa transisi ITF di Indonesia tahun 2000-2004, dan periode implementasi penuh ITF di Indonesia tahun 2005-2022, yang didasarkan pada variasi inflasi dan output.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui tingkat efisiensi dari penerapan kebijakan moneter masa transisi ITF di Indonesia tahun 2000-2004, dan periode implementasi penuh ITF di Indonesia tahun 2005-2022. Yang nantinya kita akan mengetahui di periode mana kebijakan moneter dikatakan lebih efisien.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan meningkatkan wawasan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa, khususnya mahasiswa Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi & Bisnis, Universitas Andalas mengenai tingkat efisiensi dari kebijakan moneter masa transisi ITF dan masa implementasi penuh ITF di Indonesia.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi mengenai tingkat efisiensi kebijakan moneter masa transisi ITF dan masa implementasi penuh ITF di Indonesia.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan bagi perumusan kebijakan moneter oleh Bank Indonesia, pemerintah, dan lembaga lainnya.